

Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir

Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep
Vol. 1, No. 2, Desember 2022, 254-280, E-ISSN: 0000-0000
<https://journal.ua.ac.id/index.php/jsqt>

NALAR AYAT-AYAT POLITIK KEBANGSAAN: Studi Kritis atas Kontekstualisasi Penafsiran Gus Baha'

Uzlifatul Laily

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep
uzlifatullaily@gmail.com

Abd. Rahman

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep
gusement@gmail.com

Dikirim pada:	Direvisi pada:	Disetujui pada:	Diterbitkan pada:
20 Oktober 2022	08 Desember 2022	09 Desember 2022	15 Desember 2022

Abstract

The Qur'an's verses on national politics suggest that those in power should not be careless when fulfilling their duties. However, in reality, the principles of national politics have been replaced by power politics. As a result, community control has weakened, and power struggles have become increasingly rampant. Amidst the erosion of Qur'anic values in safeguarding the Indonesian national political system, young mufasir Gus Baha contextualises his interpretation to revive the spirit of politics based on the Indonesian nation's values. This research addresses two formulations: Firstly, how is the relevance of Gus Baha's interpretation products to the practice of Indonesian national politics? Secondly, how does Gus Baha's interpretation of national political verses contextualise? The method used is qualitative library research employing Paul Ricoeur's hermeneutic theory. The research concludes two things: firstly, amidst public disappointment with the performance of leaders in this country, Gus Baha provides a breath of fresh air by suggesting that relying on the leader for the community's welfare will not be useful. Secondly, according to Gus Baha's interpretation of the verses on national politics, a leader alone cannot provide great opportunities for the welfare of their people. Instead, it depends on a social system that breeds tolerance and sympathy among them.

Keywords: Verses on national politics, contextualisation of interpretation, Gus Baha', Paul Ricoeur's Hermeneutics

Abstrak

Ayat-ayat politik kebangsaan dalam Al-Qur'an mengindikasikan agar para pemegang kekuasaan tidak seman-mena dalam menjalankan amanah. Namun realitas bahwa spirit politik kebangsaan kini telah tergantikan oleh praktik politik kekuasaan. Control dari masyarakat mulai melemah seiring dengan semakin merajanya sistem perebutan kekuasaan. Di tengah tergerusnya nilai-nilai Al-Qur'an dalam mengawal sistem politik kebangsaan Indonesia inilah, Gus Baha' sebagai mufassir muda hadir untuk melakukan kontekstualisasi penafsiran guna menghidupkan kembali semangat berpolitik berbasis ruh bangsa Indonesia. Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah; pertama bagaimana relevansi dari produk penafsiran Gus Baha' dengan praktik politik kebangsaan Indonesia? Kedua, bagaimana analisis kontekstualisasi penafsiran Gus Baha' tentang ayat-ayat politik kebangsaan? Sedangkan metode yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) berjenis kualitatif dengan menggunakan teori hermeneutika Paul Ricoeur. Kesimpulan dari penelitian ini meliputi tiga hal; pertama, di tengah kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemimpin di negeri ini, Gus Baha' memberikan angina segar bahwa menggantungkan kesejahteraan masyarakat terhadap pemimpin tidak akan berguna. Kedua, kontekstualisasi penafsiran tentang ayat-ayat politik kebangsaan Gus Baha' menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak memberikan peluang besar untuk menyejahterakan rakyatnya. Kesejahteraan rakyat bergantung pada sistem sosial yang berorientasi pada toleransi dan simpatisme sesama rakyat Indonesia.

Kata Kunci: ayat-ayat politik kebangsaan, kontekstualisasi penafsiran, Gus Baha', Hermeneutika Paul Ricoeur

Pendahuluan

Metode pengajaran tafsir di pesantren hingga kini dinilai masih belum mengalami perkembangan signifikan. Kajian tentang tafsir—apalagi tafsir kontemporer—merupakan kajian yang relatif baru serta memiliki porsi sedikit. Bahkan pada abad ke-19, pesantren hanya menggunakan kitab *Tafsîr al-Jalâlâin* karya Jalâl al-Dîn al-Suyuthî dan Jalâl al-Dîn al-Mahallî yang bahkan sampai sekarang masih dijadikan sebagai referensi dan kajian primer (Wahab, 2016).

Model pengajaran pesantren realitanya belum terbiasa dengan kajian kitab-kitab tafsir modern yang terkesan berseberangan dengan aliran keagamaan setempat. Transmisi keilmuan tafsir di pesantren hanya diarahkan pada penyampaian informasi perihal pendapat mufassir dalam setiap kitab tafsirnya. Perhatian dan upaya untuk melakukan pengembangan khazanah keilmuan dan pemikiran tentang tafsir Al-Qur'an sesuai dengan perkembangan zaman yang riil masih minim dilakukan. Akibatnya, perubahan-perubahan secara sistemik dan gradual dalam paradigma berpikir di pesantren agar selaras dengan pergeseran sosial dan perubahan zaman dewasa ini seakan jauh panggang dari api (Bisri, 2016).

Kehadiran Gus Baha' dalam dinamika penafsiran Al-Qur'an membawa warna tersendiri di tengah masyarakat Indonesia. Kiai asal Rembang yang bernama lengkap KH. Ahmad Bahaudin Nursalim adalah wujud manifestasi wawasan kreatif dan akal universal dari kalangan santri di pesantren. Di tengah polarisasi keberagamaan yang terus-menerus dikeringkan oleh kelompok keagamaan tertentu, Gus Baha' hadir (Nawawi, 2020).

Adapun sebagai misal dalam memahami surat al-Isrâ' [17]: 70-72, Gus Baha' menunjukkan warna khas penafsirannya. Gus Baha' menghadirkan spektrum pemahaman baru bahwa ketiga ayat ini justru berkenaan dengan potensi pemerintah dalam hubungannya dengan pranata sosial masyarakatnya. Sejatinya, model kepemimpinan suatu pemerintah tidak berpengaruh terhadap kehidupan sosial bangsa. Negara menjadi baik disebabkan oleh masing-masing individu baik. Tidak demikian sebaliknya.

Dunia intelektual tidak akan pernah diam hanya dengan satu kali pergumulan tentang suatu diskursus. Penulis tidak menafikan bahwa di luar sana ternyata begitu banyak bertebaran para penulis yang juga mengupas tentang ayat-ayat politik kebangsaan dan kontekstualisasi penafsiran Alquran. Seperti dalam sebuah buku tafsir yang digadang-gadang sangat berkualitas dari sisi kontekstualisasi penafsirannya berjudul *Dalam Cahaya Al-Qur'an; Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik* rakitan Syu'bah Asa (2000).

Syu'bah Asa dalam bukunya tersebut memosisikan Al-Qur'an sebagai kritik sosial. Ia berasumsi bahwa ketika terjadi proses penafsiran, maka ketika itu pula beragam tuntutan agar bangsa Indonesia berbenah diri dengan melakukan perbaikan sistem ekonomi, pranata sosial, penegakan hukum dan keadilan. Pembahasan dalam buku ini melakukan gerakan dari ranah praksis ke reflektif agar tercipta dialog interaktif antara manusia dan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya.

Selanjutnya, sebuah artikel dalam jurnal berjudul *Penafsiran Ayat Al-Qur'an Tentang Khilafah (Kajian Perbandingan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Al-Azhar Karya Abdul Karim Amrullah (HAMKA))* (Thohir, n.d.). Tulisan tersebut mendeskripsikan dan menafsirkan tentang ayat-ayat khilafah berdasar pendapat dari beragam mufassir. Barulah kemudian ia melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana konsep negara dengan konteks negara saat ini dan pandangan agama dan negara berkenaan dengan situasi kontestasi politik saat ini.

Konsep khilafah tidak akan terlepas dari dunia perpolitikan. Edi Irwanto (20108) hadir dengan judul skripnya, *Tafsir Ayat-ayat Politik (Studi Kritis Penafsiran Makna Awliya, Kewajiban Menegakkan Hukum Allah dan Ulil Amri dalam Buku Tafsir Al-Qur'an di Medios)* mengaku tertarik dengan kepribadian sosok Nadirsyah Hosen. Mahasiswa UIN Walisongo tersebut menganalisis ayat-ayat politik yang berpusat pada tiga ranah pembahasan *an sich*. Tokoh Nadirsyah

Hosen melalui buku karangannya ia jadikan sebagai pisau analisis untuk kembali melirik terma politik. Metodologi penafsiran dan pandangan Nadirsyah Hosen tentang politik dan Islam diproyeksikan dalam skripsi ini.

Di samping itu, artikel dalam jurnal Studi Islam Al-Qur'an dan Al-Hadits oleh Marjan Fadil dan Muhammad Ainun Najib (2018) berjudul *Dimensi Kontekstual dalam Tafsir Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)*. Ia mencoba untuk merekonstruksi pemikiran publik tentang kadar kontekstualisasi penafsiran HTI. Ia membantah bahwasanya HTI semata menafsirkan ayat Alquran secara literer atau tekstual. Memang ia menyetujui bahwa HTI secara umum memandang dan memahami Alquran secara literer, namun dalam penerapan khilafah justru mereka menunjukkan kontekstualisasi penafsirannya. Prinsip HTI yang menunjukkan demikian adalah "*Sikap mengintegrasikan antara urusan dunia dan agama adalah Islami, sedangkan yang memisahkan keduanya itu tidak Islami.*"

Metode Penelitian

Bentuk penulisan ini termasuk dalam kajian pustaka (*library research*) berjenis kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dan sekunder. Rekaman ceramah Gus Baha' yang tersebar dalam beragam kanal YouTube utamanya mengenai politik kebangsaan menduduki sumber data primer. Selanjutnya penulis menggunakan penafsiran ayat-ayat politik kebangsaan oleh para mufassir dan topik politik kebangsaan secara umum dalam buku dan jurnal sebagai data sekunder. Berangkat dari pemetaan antara data primer dan sekunder tersebut, maka teknik pengumpulan data ditempuh oleh penulis adalah dengan melakukan survei *channel YouTube* yang di dalamnya memuat ceramah-ceramah Gus Baha'.

Setelah data primer maupun sekunder terkumpul, barulah penulis melakukan teknik pengolahan data yang pada akhirnya bisa diketahui tentang paradigma penafsiran Gus Baha' ketika disandingkan dengan teori hermeneutika Paul Ricoeur.

Pandangan Umum Tentang Politik Kebangsaan

Politik kebangsaan yaitu visi politik yang menempatkan ke-Indonesia-an di atas kepentingan golongan, baik yang berorientasi agama, suku dan sejenisnya (Nasurung, 2017). Politik Kebangsaan sebagai politik yang memanusiakan manusia. Definisi ini dimaksudkan pada suatu lakon politik yang diterapkan dengan memandang tujuan akhir adalah menghormati, menghargai, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan politik kebangsaan akan tercipta suatu kondisi hubungan komponen bangsa yang harmonis dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang makmur, rukun dan damai tanpa ada tunggangan kepentingan individu atau golongan. Jadi secara leksikal politik kebangsaan bisa

diartikan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan bersama dari golongan manusia yang memiliki asal-usul sifat yang sama (Aminullah, 2011).

Fenomena kekinian menunjukkan gejala retrogressi, yakni pemburukan kualitas politik kebangsaan, akibat polarisasi dukungan politik yang menghadirkan kebencian antarpendukung. Pada umumnya, sejarah mencatat bahwa siapa yang mempunyai otoritas, wewenang, *power*, dan *legitimacy*, dialah yang berkuasa dalam menentukan atau paling tidak mengendalikan sesuatu pada waktu itu.

Konflik kebangsaan tersebut memang tidak akan terlepas dari pengaruh pemahaman keagaman dan realitas yang terjadi dalam tatanan kenegaraan. Dengan kata lain, kehidupan bernegara merupakan salah satu wacana yang berimplikasi pada suatu keterkaitan antara hubungan agama dan negara. Termasuk keterhubungan antara agama dan negara itu sendiri hingga saat ini menuai polemik yang tiada berujung.

1. Karakteristik Sistem Politik Kebangsaan

Politik kebangsaan merupakan sebuah cara yang ditempuh menggunakan jabatan atau kekuasaan untuk mencapai tujuan bangsa. Peran pemimpin politik sangat penting dalam menentukan arah kebijakan demi pembangunan bangsa. Dalam hal ini, KH Hasyim Muzadi merumuskan tiga pilar dalam membangun sistem politik bangsa (Nisa', 2019:42).

a. Adanya Moral dalam Berpolitik

Praktik politik diperankan oleh seluruh anak bangsa. Tidak hanya bertumpu pada elit politik sebagai pemimpin. Oleh karena itu, etika dalam berpolitik seyogyanya harus disadari dan diilhami secara maksimal oleh seluruh elemen bangsa. Harmonisasi antara yang dipimpin dan pemimpinnya menjadi penentu terciptanya suasana bernegara yang tenram dan sejahtera.

b. Adanya Kepemimpinan Nasional Substansial

Kepemimpinan nasional substansial berarti adanya suatu kemampuan memimpin yang bisa memihak kepada kepentingan rakyat dan diterima oleh rakyat. Polarisasi politik sama sekali merugikan tidak hanya pada pihak terkait, melainkan seluruh bangsa juga akan merasakan hal tersebut.

c. Keseimbangan Trias Politika dalam Perpolitikan Nasional

Suatu negara terbentuk dengan sistem perpolitikan yang nyaris mapan dan maksimal. Akan tetapi, para pemainnya seringkali melakukan serong dan seakan melenceng dari wewenang yang telah disediakan. Trias politika yang terdiri dari lembaga Legislatif, Eksekutif

dan Yudikatif perlu memiliki keluwesan dalam bekerja sama dan saling mengerti akan kerjaan dan wewenang satu sama lain.

2. Indonesia dan Spirit Politik Kebangsaan

Indonesia memang hadir sebagai sebuah negara yang tidak mendasarkan ideologinya pada syariat Islam, melainkan pada asas-asas Pancasila. Hal ini berdasarkan semangat para *founding fathers* yang menggaungkan spirit kebangsaan persatuan, mensinergikan semangat keislaman dan semangat kebangsaan demi terciptanya tujuan negara. Hadratussyekh Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan (Nasurung, 2017).

Politik kebangsaan memiliki visi politik yang menempatkan ke-Indonesia-an di atas kepentingan golongan, berorientasi agama, suku dan sejenisnya. Realita di lapangan tidak semulus dengan idealita dalam wacana. Persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Terdapat beberapa pihak yang memanfaatkan jabatan politiknya demi kepentingan kekuasaan. Menggunakan berbagai cara untuk memecah belah NKRI. Harapan besar yang dilekatkan kepada segenap elit negeri seakan hilang karena tingkah penguasa yang tidak menampakkan tanggung jawab dan komitmen kebangsaan (Nisa', 2019:67).

Adapun sinergitas pandangan antara pemerintah dan ulama menjadi salah satu alternatif solutif demi mengurangi krisis moralitas dalam kontestasi politik tersebut. Keduanya sama-sama memiliki pengaruh dalam memberikan aturan dan arahan kepada seluruh bangsa. Pemerintah berupaya untuk memberikan prioritas kinerjanya untuk rakyat secara umum, sedangkan ulama bisa memiliki pandangan yang heterogen untuk seluruh bangsa tanpa melihat latar belakang keagamaannya sebelah mata.

Gus Baha' dan Instrumen Penafsiran Politik Kebangsaan

Gus Baha' merupakan sosok yang dikenal sangat alim dan rutin melakukan pengajian. Pengajian yang dilaksanakan beliau juga sudah banyak tersebar media sosial dan mulai memenuhi dunia maya sejak satu tahun terakhir, yakni 2019 lalu. Dalam melakukan kajian atau ceramah, Gus Baha' memiliki karakteristik yang didasarkan kepada orientasi atau kecenderungan termasuk dalam beberapa hal berikut:

a. Pemakaian Analogi demi Penyederhanaan Bahasan

Gus Baha', melalui topik-topik sederhananya seperti telah membaca perihal kebutuhan publik di luar pesantren. Beliau tidak ingin memaksakan cara pandangnya di dalam memahami masalah kepada jamaah yang

mendengarkan. Itu bisa dicermati dari ketika beliau mencoba menyederhanakan deskripsi Fikih yang rumit menjadi mudah, melalui perumpamaan-perumpamaan sederhana. Ketidak inginan Gus Baha' dalam memaksakan cara pandangnya kepada audiens seringkali diartikulasikan dalam ungkapan yang jujur, "*Ini penting saya utarakan*".(MusliModerat, 2020).

Gus Baha' juga sering mengulang hingga dua kali atau lebih tentang pembahasan tertentu dengan membubuh kalimat, "*Paham nggeh?*" Beliau tidak masih saja mengkhawatirkan jamaah yang sulit paham terhadap penjelasan-penjelasannya. Selain karena terkesan nihil manfaat, jamaah yang tidak paham secara sempurna juga dikhawatirkan akan menebar pengetahuan yang bahkan keliru sama sekali.

b. Kehadiran alasan logis untuk meyakinkan audiens

Fenomena Gus Baha sangat menarik. Bukan saja karena materi-materi yang disampaikan berhasil menyentuh sendi-sendi kehidupan. Gaya penyampaiannya yang sederhana dan kepakarannya dalam bidang Al-Qur'an berikut kandungannya seringkali membubuhki kisah-kisah yang ketika ayat-ayat itu diturunkan. Kelancarannya dalam menyampaikan materi dan variasi penjelasannya menunjukkan betapa luas pengetahuannya. Hampir semua materi ceramahnya juga mengajak jamaah untuk berpikir dan merenung (Anam, 2019).

c. Bergaya humoris dan toleran khas orang NU

Gus Baha' dalam setiap penyampaiannya menunjukkan karakter pribadi kiai sekaligus santri NU yang humoris namun toleran. Tradisi guyongan, gojlokan, bahkan dalam acara formal sekalipun, kiai-kiai NU dan santri masih sempat mengeluarkan *joke-joke* dan pelesetan. Seriusnya 5 menit, goyunannya 10 menit. Gus Baha' menurut Fathurrosyid, mendasarkan epistemologi Islam dan dakwah ceria terhadap empat hal (Fathurrosyid, 2019).

Pertama, berdasar Al-Qur'an. Potongan ayat *adlhaka* (tawa) *wa abka* (*tangis*) adalah ajaran normatif agar kita memilih berdakwah dengan penuh keceriaan namun tidak menghilangkan rasa sedih sama sekali. Untuk itulah, mayoritas ulama, utamanya NU menghindari perilaku formal dan serius. *Kedua*, berdasarkan hadits. Gus Baha' mengutip hadits yang termaktub dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, karya Imam al-Ghazali, Rasulullah bersabda, "*Sungguh, termasuk ummat terbaikku adalah kaum yang tertawa keras (yadlhakuna jahran), karena percaya terhadap luasnya rahmat Allah (min sa'ati rahmatih)*.

Ketiga, berdasar tradisi sahabat yang menyatakan, "*Yang paling aku sukai dari orang alim itu adalah ceria (thaliqin) dan banyak guyon (midlhakin)*".

Tugas kiai atau dai justru harus tampil ceria dan tidak menakut-nakuti. Keempat, berdasar tradisi tabi'in. Gus Baha mengutip pendapat Ibnu Hajar al-'Asqalani, bahwa, "Senang itu adalah ibadah dan puncak keimanan adalah mansinya iman (halawatal iman)". Syarat menemukan halawatal iman, harus merasa nyaman yang dieksprisikan dengan nuansa guyon dan tertawa (Fathurrosyid, 2019).

Adapun penafsiran ayat-ayat politik kebangsaan Gus Baha' dapat dilihat saat beliau berbicara tentang pemerintahan atau yang senada dengan hal tersebut. Berikut sub tema yang sengaja diambil tentang penafsiran Gus Baha' terakait dengan politik kebangsaan itu sendiri.

1. Ulil Amri (an-Nisâ' [04]: 59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

Umumnya para mufassir menggunakan kandungan surat dalam an-Nisâ' [04]: 56 dalam memaknai istilah ulul amri. Berbeda dengan Gus Baha' seraya mengutip pendapatnya Imam Suyuthi bahwasanya ayat tersebut tidak berbicara tentang ulul amri dalam arti pemerintah melainkan suatu pemimpin perang yang mendapat amanah langsung dari Nabi Muhammad. Apalagi jika melihat asbabun nuzulnya yang kemudian akan dipahami bahwa objek yang terkena istilah ulul amri adalah para angkatan perang saat terjadi ekspansi Islam.

Syekh Imam Suyuthi melanjutkan bahwa yang dimaksud dengan ulul amri adalah seluruh ulama yang terdiri dari *ahlul halli* (ahli memutuskan perkara) dan *ahlul 'aqdi* (ahli menguraikan masalah). "Masih menurut Imam Suyuthi bahwasanya keputusan pemerintah mestinya masih ditangguhkan atas fatwanya ulama. Hakikat ulama justru ulul amri itu sendiri". Ayat ini mengisyaratkan bahwa bupati, gubernur, bahkan presiden, jika melihat asbabun nuzulnya, tidak termasuk dalam kategori ulul amri.

"Akan tetapi pengetahuan tentang ini tidak banyak diketahui orang," begitulah Gus Baha' berdawuh. Dalam teori militer, tidak ada ruang untuk berpolemik, beradu argumentasi dan lain sebagainya yang tentunya mereka dituntut untuk patuh terhadap keputusan final ketuanya. Dalam peperangan, Nabi Muhammad ketika sudah menunjuk satu sahabat untuk menjadi ketua kelompok perang, maka sahabat lain wajib hukumnya untuk mematuhi segala perintahnya.

2. Karakteristik Pemimpin Ideal (Al-Najm [53]: 42)

وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى

Dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu).

Berbicara tentang pemimpin, Gus Baha' menekankan pentingnya menanamkan keimanan kepada Allah. Segala fenomena kehidupan manusia berdasarkan takdir yang telah disuratkan oleh-Nya. Gus Baha' mendasarkan pernyataan tersebut pada Al-Qur'an surat an-Najm [53]: 42. Termasuk dalam hal ini dalam memandang kinerja seorang pemimpin.

Kamu tidak bisa menyalahkan presiden Jokowi kalau kamu miskin yang memberikan kekayaan dan kemiskinan kepadamu, presiden apa Allah? Allah. Zaman sekarang selalu menghadirkan teori kesejahteraan. Jangan terjebak kepada hukum modern. Menyalahkan pemimpin yang tidak berhasil menyejahterakan rakyatnya.(YT Ngaji Bareng, 2020)

Sejatinya tidak ada pemimpin yang ideal. Apalagi yang mendapat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat tidak layak jika selalu menuntut kesejahteraan kepada pemimpinnya. Melalui surat Al-Baqarah [2]: 38, Gus Baha' sedikit memberikan hiburan kepada para pemimpin yang tengah menjabat kini. Bahkan walaupun mendapat perlakuan atau sikap yang menyiratkan kebencian, Gus Baha' menyatakan hal tersebut sebagai batu loncatan untuk mendapatkan kebaikan.

"Syarat pemimpin hanya dua; adil dan tidak zalim. Nabi Sulaiman membiarkan Ratu Balqis menjadi pemimpin." (Kajian Islam, 2020). Dengan demikian, Gus Baha' tidak melarang adanya seorang pemimpin dari kalangan perempuan. Walaupun dalam suatu kitab, lanjut Gus Baha', ada yang mensyaratkan seorang pemimpin harus adil dan berjenis kelamin laki-laki. Namun apabila digandengkan antara pemimpin laki-laki zalim dan pemimpin perempuan adil, maka Gus Baha' menegaskan lebih memilih pemimpin perempuan.

Pada akhirnya sebagai bangsa demokratis, masyarakat harus menghargai adanya *consensus* (Sufipedia, 2017). Gus Baha' mewajibkan keterlibatan orang-orang saleh untuk ikut berkecimpung dengan dunia birokrasi tersebut. Sejarah dahulu mengisyaratkan banyaknya tokoh-tokoh Islam yang berkiprah bahkan memberikan kontribusi dalam memajukan kerajaan atau dalam pendirian NKRI. Keterlibatan mereka yang pertama kali menanamkan spirit politik kebangsaan.

3. Demokrasi dan Demonstrasi (Ali 'Imran [3] 103 dan al-Baqarah [2]: 251)

Mengenai dua topik ini, penulis menemukan ceramah beliau tidak dalam satu meomentum. Pertama, demokrasi "*Demokrasi bukanlah syai'un maujuudun* (sesuatu yang wujud). *Sejatinya demokrasi tidak ada. Lebih orang yang mengatakan rela mati demi demokrasi*". Gus Baha' bahkan menambahkan bahwa masihlah lebih baik menggantungkan hidup, tidak kepada

demokrasi, melainkan pada makanan karena mempertimbangkan sifat kewujudannya (Kajian Cerdas Official, 2020).

Gus Baha' memberikan koreksi tegas pada redaksi *rela mati demi demokrasi* ini. Jika hanya mengatasnamakan demokrasi, maka keuntungan timbal-balik tidak akan didapatkan oleh seorang manusia (Kajian Cerdas Official, 2020). Sehingga, menurut beliau, boleh ada tindakan demokratis, namun niatkan untuk menjalankan kesunahan ataupun ajaran agama Islam. Dengan demikian, seorang manusia setelah tindakan demokratis tersebut masih akan diberikan pahala oleh Allah Swt. Gus Selanjutnya, Gus Baha' memberikan indikator terhadap upaya demokrasi ini yaitu terdapat dalam surat Ali 'Imran [3] 103.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جِيَعاً وَلَا تَرْقُوا وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَالَّذِي بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبِحْتُمْ
بِنِعْمَتِهِ إِخْرَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَآ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحَمَّلُونَ

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

Selanjutnya secara pribadi beliau menyatakan bahwa dalam konteks Indonesia sendiri, yang termasuk tindakan demokratis ialah antara mau memilih NU atau Muhammadiyah. Hadirnya organisasi kemasyarakatan baru *toh* walaupun memiliki visi dan misi yang matang berupa persatuan umat, tetaplah pada akhirnya mereka yang akan menjadi propaganda perpecahan umat. Jargon yang diutarakan memang demi mencapai persatuan umat, namun justru kehadiran mereka yang menjadi pemicu terbelahnya umat Islam.

Kedua, demonstrasi. Munculnya pendapat Gus Baha' mengenai demonstrasi ini akibat pertanyaan yang diajukan oleh seorang mahasiswi dari salah satu kampus di Surabaya. Ia menanyakan akan hukum melaksanakan demonstrasi sebagai wujud apresiasi dalam menyuarakan haknya sebagai bangsa Indonesia. Ia sadar bahwa bagi seorang perempuan muslim, terdapat batasan-batasan tindakan yang tidak boleh sembarang dilakukan. Norma-norma Islam memberikan keistimewaan dan pemuliaan terhadap kaum perempuan agar terhindar dari kerugian atau kemaksiatan.

"Demonstrasi makna pokoknya show. Sebuah pertunjukan. Sementara suatu kekuatan harus ada yang ngontrol," begitulah Gus Baha' memulai jawabannya.

Untuk itu, fleksibelitas Islam sebagai sebuah agama manusia tidak menghalangi umatnya untuk menyuarakan aspirasinya pada pemerintah atau negara (NU Online, 2019). Sebuah kekuatan harus dikontrol. Tindakan demonstrasi oleh Gus Baha' dianggap sebagai salah satu wujud implementasi dari surat al-Baqarah [2]: 251.

فَهَزَّوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلُوا جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَعَلَمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعَ اللَّهِ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam.

Tindakan saling mengontrol merupakan sebuah upaya yang Allah berikan agar tercipta suatu hubungan yang harmonis dan seimbang dalam payung visi dan misi yang masih seragam. Perpecahan diprakarsai oleh adanya ketidakseahaman yang tak kunjung mendapatkan solusi. Tanpa adanya demonstrasi maka bisa dipastikan kehancuran akan dapat segera terjadi. Gus Baha' juga memberikan kriteria demonstrasi yang baik adalah selama tidak anarkis, tidak merusak dan tidak kontraproduktif.

Relevansi Penafsiran Gus Baha' dengan Praktik Politik Kebangsaan Indonesia

Politik dapat dibedakan menjadi dua; *pertama*, politik kebangsaan. Dalam praktik politik kebangsaan, semua warga diharapkan bisa berpartisipasi aktif dalam melakukan upaya dalam memajukan bangsa dan negara. Termasuk dalam hal tersebut adalah berperan dalam melakukan pembangunan dan mendukung terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. *Kedua*, politik kekuasaan. *Nah*, pada model politik kekuasaan ini para elit politik memiliki orientasi penuh dalam menduduki kekuasaan atau suatu jabatan. Panggung politik dijadikan wahana untuk mendulang posisi politik setinggi mungkin.

Ceramah atau pengajian Gus Baha' yang paling tren terkait dengan pendapatnya tentang Pilpres 2019 silam. Selain itu, dalam beberapa pertemuan memang Gus Baha' sesekali menyenggung pola pikir dan praktik pemerintahan Indonesia. Sistem tata negara Indonesia dibentuk untuk mengelola dan mencapai keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Indonesia adalah negara hukum. Berbagai lembaga dan kebijakan didirikan untuk menciptakan hukum yang adil bagi seluruh elemen bangsa Indonesia. Memaknai ulul amri sebagai pemerintahan dalam konteks Indonesia sudah tepat.

1. Diam dalam Menyikapi Pemerintah

Gus Baha' dalam suatu kali berdawuh menampakkan dukungannya kepada pemerintah. Demikian pada kesempatan lain, beliau terkadang memilih kontra. Hal tersebut secara sementara melahirkan pemahaman ambigu. Akan tetapi, ketika dipahami kembali secara hati-hati dan mendalam, maka akan nampak maksud dan tujuan Gus Baha' menyatakan demikian. Sehingga tidak ada pernyataan Gus Baha' yang bertolak belakang satu dengan lainnya.

Sebagaimana Gus Baha' ketika menyinggung pilpres pada tahun 2019 kemarin. "*Allah itu arhamur rahimin. Allah itu khoirur roziqin. Kenapa kita harus menggantungkan rezeki pada presiden tertentu? Dikira nyindir. Fatwa ini!*"(Ngaji Kiai, 2019). Pada potongan dawuh ini, Gus Baha' berusaha untuk menyadarkan masyarakat yang fanatic buta terhadap calon presiden tertentu. Mereka kerap kali menunjukkan sikap atau tindakan yang berlebihan dalam memberikan dukungannya. Bahkan dalam beberapa daerah, nyawa menjadi taruhan tunggal dan tergadaikan apabila presiden yang didukung tidak terpilih.

Menurut Gus Baha', presiden, siapapun mereka tidak akan membuat masyarakat Indonesia menjadi sejahtera selama masa kepemimpinannya. Menjadi lucu apabila rakyat menggantungkan nasib dirinya kepada calon presiden tertentu. Tidak perlu menggantungkan nasib Islam, nasib bangsa Indonesia pada pemerintah. Agama Islam dijaga langsung oleh Allah, sedang nasib masyarakat, rezeki dan jaminan kebahagiaan mereka telah dijamin oleh kemahakuasaan-Nya.

Masyarakat tidak perlu berlebihan dalam menghadapi atau mengambil sikap kepada pemerintah. "*Untuk orang yang terlalu keras dengan pemerintah, mending diam saja. Uskut!*"(Ngaji Kiai, 2019). Namun bukan berarti boleh bertindak semena-mena dalam artian tidak patuh pada pemerintah.

Ungkapan Gus Baha' yang menggunakan redaksi, *terlalu keras dengan pemerintah* ini oleh penulis diilhami dalam dua pengertian sekaligus. Yaitu sikap pro secara berlebihan dan sebaliknya, kontra terlalu kelewat. Artinya terlalu keras mendukung dan terlalu keras menolak. Maka masyarakat yang demikian, alangkah lebih baik jika diam saja. Karena jika terpelihara dan diperlakukan secara terus-menerus maka akan mengakibatkan kerugian terhadap negara dan bangsa Indonesia. Menurut Gus Baha', tidak akan ada pemerintah, sampai kapanpun yang bisa sesuai dan cocok menurut idealisme masing-masing rakyat Indonesia. Aspirasi rakyat tidak harus diserap dan dituruti secara keseluruhan. Dalam suatu

golongan bisa saja kebijakan pemerintah baik. Namun tidak berarti pada golongan yang lain pun demikian.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ بَعَثَ مِنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْكُمْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِّنْهُ

Presiden ataupun pejabat pemerintah merupakan sosok yang pantas mengemban amanah tersebut. Takdir Allah telah menjatuhkan jabatan demikian. Tidak elok jika masyarakat tertentu menuntut presiden atau pemerintah karena kurang begini dan begitu. Padahal hal tersebut hanya didasarkan pada naluri golongan tertentu saja.

2. Urgensi Dominasi atau Suara Majoritas

Suara mayoritas mewakili suara Tuhan. Barangkali pernyataan demikian yang ingin diutarakan oleh Gus Baha'. Suara mayoritas mendekati kebenaran walaupun tidak secara mutlak. Beliau mewanti-wanti agar senantiasa menjaga dominasi namun tidak lantas mencela minoritas. Gus Baha' mengutarakan bahwa dari saking kuatnya dominasi, sampai-sampai logika atau argumentasi pun tidak akan menang atau berkuasa jika berhadapan dengan kelompok dominan. "*Apa gunanya logika jika kalah dalam segi majoritas? Perang tanpa argumentasi, tapi berdasar jumlah populasi bisa menang*"(Path to Jannah, 2019).

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia dan sangat plural, sehingga dibutuhkan slogan yang bisa menjaga realitas yang plural tersebut. Menyikapi realitas itu, muncullah simbol Bhineka Tunggal Ika, pemikiran pluralisme, nasionalisme dan toleransi antar anak bangsa (Rasyid, 2019:173).

3. Wajibnya Keterlibatan Orang Saleh dalam Berpolitik

Kontestasi politik di Indonesia, dimafumi sebagai dunia yang penuh dengan tipu muslihat. Sesama pejabat saling sikut dan menyudutkan satu sama lain. Mempergunakan segala macam cara agar misi tercapai. Dari saking buruknya. Masyarakat awam seringkali memandang nyinyir apabila terdapat ulama atau kiai yang terjun dalam dunia politik. Mereka menganggap sudah tidak lagi berkewajiban untuk patuh dan taat terhadap dawuh ulama-politikus lantaran sudah masuk dalam kelompok elit politik.

Asumsi demikian menurut Gus Baha' patut mendapat perhatian penuh. Keterlibatan ulama atau orang saleh dalam dunia politik merupakan suatu ibadah bahkan wajib. Karena dalam memilih pemimpin saja, umat Islam harus memperhitungkan kedulian si calon pemimpin terhadap agama, utamanya agama Islam. Memperhitungkan untung rugi karena agama. Jika tidak bisa menguntungkan, paling tidak ia tidak memberikan mudarat terhadap eksistensi keberagamaan umat.

Adapun dalam memaknai kata suap, Gus Baha' memiliki pandangan berbeda. Kalangan awam begitu mudah dalam menjatuhkan kasus atau anggapan suap terhadap pemerintah atau oknum tertentu. "*Orang saleh sering gampang bilang telah terjadi suap dan lain sebagainya pada DPR. Bisa jadi DPR melakukan begitu karena ada niatan demi agama*"(Santreh Konengan, 2020). Menurut Gus Baha', kursi jabatan dalam jajaran pemerintahan hukumnya wajib diduduki oleh ulama kiai yang paham agama. Perebutan kekuasaan antara orang alim dan dzolim harus dilakukan. Artinya apabila ada orang dzolim yang menginginkan jabatan, ulama wajib hukumnya merebutnya.

Makanya di kitab Fathul Mu'in diterangkan bahwa fatwanya ulama, kalau ada jabatan, apa itu lurah, presiden, bupati, gubernur, mau direbut orang dzolim, dan orang dzolim mesti menang karena beli, itu orang sholeh wajib beli. Anggap saja membeli kebenaran. Dan itu bukan suap (Santreh Konengan, 2020).

Gus Baha' ketika memberikan ceramah dalam rangka haul K. Maimoen Zubair seraya membacakan makalahnya menyatakan bahwa Mbah Moen setuju jika dari kalangan ulama menjadi pejabat pemerintah. "*Minimal walau tidak jadi pejabat, ya, bisa berkoalisi dengan pemerintah. Supaya kualitas keagamaannya tidak terganggu*"(Thalabul Ilmi, 2020).

Kaitannya dengan kehidupan politik di Indonesia, prinsip apa pun yang mengandung unsur kemaslahatan tidaklah haram untuk diterapkan di dalamnya. Kehidupan politik, tidak saja memerlukan garis pedoman yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang tertulis, tetapi kehidupan politik juga membutuhkan nilai-nilai etika sebagai aturan tidak tertulis, seperti halnya nilai-nilai tasamuh. Sebab tidak jarang terjadi, oknum atau kelompok, karena mengabaikan atau melanggar nilai-nilai etika bisa berakibat fatal.

4. Jangan Menuntut Sempurna pada Pemerintah

Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tidak sepatutnya selalu menuntut secara berlebihan kepada pemerintah. Walaupun negara ini menganut sistem demokrasi dan seluruh warga berak menyuarakan pendapat dan aspiranya pada wakil rakyat, bukan berarti berkuasa untuk selalu tidak merasa cocok dengan mereka. Apalagi jika selalu menuntut ideal kepada pemerintah. Gus Baha' memberikan angin segar bahwa tidak selamanya pemerintah

Nabi saja tidak bisa meraup dukungan dari seluruh umat Islam. Masih saja ada orang munafik yang menyisipi terhadap kepemimpinan Rasulullah. Apalagi sekadar kiai, presiden, kapolri. Apapun konsepnya tidak bisa pasti ada yang setuju dan ada yang tidak. Namun hingga kini

problematika yang muncul adalah elit politik memiliki akal bahwa barang siapa yang berjasa banyak, maka nanti akan mendapat banyak imbalan.

Ini penting saya utarakan, karena ada fenomena menuntut kesempurnaan. Orang kayak pak Kurni itu baik. Patriotik. Gara-gara tidak bisa menjatuhkan inflasi dijatuhkan. Namanya juga baru merdeka kok mau mau makmur. Nggak mau inflasi. Gimana pikiranmu (Agus Mujib, 2020).

Analisis Kontekstualisasi Penafsiran Gus Baha'

1. Karakteristik Kontekstualisasi Penafsiran Gus Baha'

Gus Baha' dalam memberikan penafsiran selalu dalam momentum ceramah atau pengajian. Beliau tidak menuliskan gagasan-gagasan tafsirnya menjadi sebuah buku ataupun makalah. Terkecuali saat acara *haul* K. Maimoen Zubair. Pada saat itu, beliau membuat makalah berjudul *Al-Intishar* dan membacakannya dalam momen yang sama. Makalah tersebut berisi *ta'bir* yang sering dipakai oleh gurunya, K. Maimoen Zubair semasa hidup. Akan tetapi, makalah tersebut tidak didistribusikan untuk semua kalangan.

Perlu dipahami bahwa dalam setiap kesempatan berbicara atau berceramah, Gus Baha' tidak pernah menafikan eksistensi audiens yang hadir kala itu. Beliau paham betul akan pentingnya melihat audiens serta situasi dan kondisi yang meliputinya. Meskipun latar belakang kehidupan Gus Baha' diliputi oleh tradisi keagamaan beraroma Nahdlatul Ulama secara kental, namun dalam setiap ceramahnya justru Gus Baha' lebih menonjolkan aspek loyalitas terhadap ilmu pengetahuan dan fakta sejarah secara objektif.

Kontekstualisasi penafsiran Gus Baha', menurut penulis bermuara pada beberapa aspek berikut:

a. Bernuansa Hermeneutis

Gus Baha' tidak menyampaikan secara verbal terkait dengan adanya nuansa hermeneutis dalam beberapa penafsiran yang dilakukan. Namun dalam salah satu ceramahnya beliau menyatakan bahwa teks termasuk barang mati. Ia dalam beberapa keadaan tidak akan memberikan sumbangsih apa-apapun dalam kehidupan maupun laju pemikiran manusia secara mandiri. Untuk itu, pembacaan teks secara lahiriyah tanpa melakukan upaya-upaya lain sama halnya dengan menjerumuskan diri sendiri pada kesesatan.

Teks itu barang mati. Kelirunya Khawarij kan begitu. Baca Al-Qur'an dan paham dengan melihat teksnya. Tanpa mengikuti aqwalul

ulama. Teks harus disandingkan dengan aqwalul ulama. Teks bukan manhaj. Makna teks ya tetep akan begitu (Tabligh Kata Channel, 2019).

Gus Baha' juga sering mewanti-wanti para santrinya maupun audiens untuk tidak hanya memahami Al-Qur'an lewat terjemahannya saja. Bahasa terjemah terkadang tidak bisa mewakili akan maksud yang diinginkan oleh teks tersebut. Dibutuhkan ilmu-ilmu lain sebagai penunjang agar pemahaman tercapai secara optimal. Gus Baha' senantiasa menyemangati para umat muslim untuk terus belajar dan menghafal. Khazanah Islam terutama warisan para ulama patut dikaji ulang oleh generasi selanjutnya

b. Kontekstual dan Berorientasi pada Spirit Al-Qur'an

Penafsiran secara kontekstual dilakukan Gus Baha' tanpa meninggalkan sama sekali terhadap penafsiran ulama terdahulu. Dengan tegas Gus Baha' mengutarakan kesetujuan atau ketidaksetujuannya terhadap pendapat ulama tersebut. Kata beliau, "*Berbeda pendapat sesama ulama itu sudah biasa. Asal selevel. Saling memberikan kritik antara guru dan murid pun sudah biasa dilakukan. Tapi sekali lagi, asal selevel.*"

"Orang yang belajar Al-Qur'an akan dimudahkan setiap urusannya."(Bintang Songo, 2020) Gus Baha' seringkali menggunakan logika Al-Qur'an dalam menjawab permasalahan maupun pertanyaan dari masyarakat. Hal demikian tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang benar-benar paham dan menguasai Al-Qur'an. Penggunaan logika yang sejalan dengan Al-Qur'an ini dicirikan sebagai penafsiran secara kontekstual. Mayoritas muslim tidak akan berani atau tidak akan berhasil untuk memanfaatkan sudut-sudut lain dari Al-Qur'an. Al-Qur'an dalam setiap ayat demi ayatnya menyerukan kedamaian, kebahagiaan, persatuan, dan lainnya. Spirit inilah yang oleh Gus Baha' dijadikan batu pijakan dalam melakukan penafsiran maupun berceramah.

c. Anti fanatisme mazhab

"Kadang saya Maliki sekali. Dan ini bukan masalah. Kamu nggak harus cocok, tapi kalau logis ya harus percaya."(Sekolah Akhirat, 2020) Gus Baha' tidak transparan untuk menunjukkan toleransinya dalam bermazhab. Sebagai syarat mencari ilmu, seseorang harus menguasai seluruh khazanah keilmuan yang ada. Tindakan fanatisme terhadap golongan sendiri akan menghalangi seseorang untuk belajar dan mendalami golongan lain. Mereka sudah mengantongi asumsi bahwa tidak diperlukan mempelajari atau mendekati kelompok lain. Lebih parah lagi jika sampai ada klaim-klaim kebenaran terhadap golongan sendiri

dan menyalahkan kelompok lainnya. Melawan keharaman, bukan mentakhsish keharaman.

Membuktikan ucapan Gus Baha' di atas, beliau memberikan contoh perihal hukum atau dendaan bagi pasangan suami istri yang bersetubuh saat bulan Ramadan. Menurut madzhab Syafi'i, denda untuk sepasang suami istri ini secara berurutan adalah memerdekaan budak, memberikan makan anak yatim, atau puasa selama dua bulan berturut-turut. Hukum demikian menurut madzhab Maliki terlalu berat. Sementara makan di siang hari saat puasa bulan Ramadan tidak juga demikian *kaffarahnya*. Padahal antara makan dan jimak sama-sama merupakan tindakan yang mubah. Persetubuhan sepasang suami istri mubah begitupun juga dengan makan. Lantas mengapa denda keduanya begitu juah berbeda?

Menyikapi perbedaan yang demikian, Gus Baha' menyatakan harus *fair* dalam memberikan argumentasi. Artinya jika dilihat dari segi rasionalitas, alasan dari madzhab Maliki memang masuk di akal. Kita sebagai pengikut madzhab Syafi'i tidak diperkenankan untuk menolak hal tersebut. Secara rasional, kita boleh menunjukkan kesetujuan dalam pemikiran walaupun dalam praktik, kita tidak melakukan hal tersebut.

2. Kinerja Kontekstualisasi Gus Baha'

Dalam melakukan kontekstualisasi penafsiran, Gus Baha' terlebih dahulu menempuh beberapa proses. Berikut langkah-langkah yang ditempuh Gus Baha' dalam menafsirkan ayat-ayat politik kebangsaan berdasarkan hermeneutika Paul Ricoeur.

a. Otonomi Teks

Proses menafsirkan teks berawal dengan menebak atau mengira-ngira makna teks (kata-kata) yang disuguhkan secara apa adanya. Pembaca dalam hal ini mufassir sebenarnya tidak mempunyai akses untuk mengetahui maksud pengarang. Proses pemahaman paling awal ini memungkinkan kehadiran makna teks yang beragam. Sebab proses penafsiran demikian hanya mencoba memahami makna teks secara umum, belum sampai mendetail.

Mengenai hal ini, Gus Baha' sejatinya mendasarkan pada pendapatnya Fakhrurozi dalam tafsirnya. "*Sebagian ayat Al-Qur'an harus kamu tafsirkan sesuai dengan yang kamu lihat. Karena itu barokah meskipun kamu nggak cocok, ya, itu barokah namanya.*" Tradisi intelektual Islam memuat suatu sisi menarik yang tidak dimiliki oleh ragam keilmuan di luar Islam berupa barokah. Pada proses pemahaman awal teks, Gus Baha' sudah mengharapkan kemurahan Allah untuk

memberikan tambahan kebaikan selama melakukan proses pemahaman Al-Qur'an.

Berikut proses otonomi teks yang akan diaplikasikan, *pertama*, pada surat Al-Nisâ' [04]: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ثَوْبًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Secara otonom, teks tersebut merupakan bentuk *amr* perintah yang ditujukan kepada orang-orang mukmin untuk taat atau patuh kepada tiga objek meliputi Allah, Rasul, dan *ulil amr*. Apabila dalam praktiknya, orang mukmin menemui perselisihan pendapat dalam menyikapi sesuatu, maka hendaknya hanya dikembalikan atau mengikuti kehendak Allah dan Rasul-Nya. Sikap demikian hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki iman kepada Allah dan hari akhir.

Ayat *kedua*, berkenaan dengan pemaknaan demokrasi yang terdapat dalam Ali 'Imran [3] 103.

وَاعْتَصِمُوا بِبَرِّ الْأَرْضِ وَلَا تَرْفَعُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَالْفَلَقَ بَيْنَ قَلْوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِحْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَافِ حُكْمِهِ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

Adapun mengenai ayat di atas, secara otonom dapat dipahami bahwa Allah hendak memperingatkan manusia akan anugerah berupa persatuan dalam bingkai kerukunan yang diberikan oleh Allah. Selain itu, Allah juga memberikan pertolongan kepada umat muslim yang nyaris masuk ke neraka, namun oleh Allah masih diberikan kesempatan untuk selamat darinya. Firman-firman Allah yang

demikian ditujukan kepada seluruh umat muslim agar senantiasa sadar dan terus mengharapkan kasih dan sayang dari Tuhannya.

Ayat ketiga, tentang pandangan dalam praktik demonstrasi termaktub Al-Baqarah [2]: 251.

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَهُ مَا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعَ اللَّهِ النَّاسَ بِعَضَّهُمْ بِعَضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam.

Ayat di atas, terlebih dahulu Allah memberikan kisah atau gambaran sekilas tentang peperangan yang terjadi antara Thalut dan Jalut. Allah memberikan kemenangan atas tentara Thalut. Kemudian sepeninggal Thalut, Daud menggantikan tampuk kepemimpinannya. Peristiwa demikian tentulah atas izin dan kehendak Allah dengan menekan upaya saling mematahkan satu sama lain. Rahmat dan karunia yang dimiliki Allah meliputi seluruh makhluk di bumi beserta keseluruhan alam.

b. Dekontekstualisasi Teks

Pada surat an-Nisâ' [04]: 56, para mufassir umumnya menggandengkan ulul amri dengan maksud jajaran pemerintah dan pemegang kekuasaan sejenisnya. Namun persoalannya adalah terletak pada kelayakan posisi ulul amri—yang dimaksudkan untuk penguasa—berada sejajar dengan Allah dan Rasul-Nya sehingga umat Islam patut untuk taat kepadanya. Sedangkan penguasa era kini telah begitu kental dengan keserakahan dan menyebabkannya jauh dari kesungguhan sosok pemimpin.

Pemaknaan ulul amri dengan pemerintah atau pemegang kekuasaan menjadi sebuah keistimewaan tersendiri. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya menjadi sebuah keharusan yang bersifat mutlak bagi umat Islam. Sehingga dengan melihat redaksi ayat tersebut, ulul amri juga mendapat porsi besar untuk ditaati melebihi orang tua, guru dan lain sejenisnya.

Al-Qur'an secara berurutan memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Allah, Rasulullah, dan terakhir ulul amri. Redaksi demikian juga ditemukan di beberapa ayat dan surat Al-Qur'an

berbeda. Permasalahannya adalah terletak pada siapakah sebenarnya sosok ulul amri yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an tersebut? Apakah memang benar sebagaimana anggapan umum orang Islam bahwasanya ulul amri dipahami sebagai pemerintah?

Apabila melihat pada situasi dan kondisi saat ini, utamanya di Indonesia yang menganut sistem demokrasi dengan model *nation-state*, pemaknaan ulul amri dengan pemerintah mungkin saja bisa diterima. Pemerintah yang memiliki wewenang dalam memberikan jaminan dan pelayanan kepada masyarakatnya. Mengurus hampir di seluruh sektor kehidupan rakyat Indonesia. Walaupun demikian, bagaimana dengan pemerintah yang justru menyalahgunakan kekuasaannya tersebut hanya untuk kepentingan pribadi sehingga abai pada kepentingan masyarakat?

Selain itu, Indonesia sebagai pengikut agama Islam mayoritas, di samping memiliki pemerintah yang harus dipatuhi juga terdapat ulama yang juga wajib untuk taat terhadap mereka. Apalagi porsi kepatuhan antara pemerintah dan ulama, masih lebih banyak diberikan kepada ulama. Berbeda permasalahan lagi apabila ada ulama yang memilih untuk turut berperan dalam jajaran pemerintahan Indonesia. Permasalahan-permasalahan demikian yang sering disinggung oleh 'Gus Baha' di beberapa ceramahnya.

Pada ayat kedua (Ali 'Imrân [3]: 103), dapat dimafhumi bahwa Allah mencintai persatuan. Islam mengendaki perdamaian. Betapapun bumi telah rusak oleh perilaku dan keserakahan manusia, tetaplah manusia sendiri dapat bernafas hingga kini. Pertengkarannya memang acap kali terjadi. Namun Allah nyatanya masih memberikan karunia-Nya dengan tetap menjaga dan mempertahankan keutuhan hidup manusia secara umum. Orang muslim maupun non muslim sama-sama memperoleh karunia-Nya, dikarenakan hingga saat ini mereka bisa hidup bahagia dengan segala ketersediaan dan kenyamanan tinggal di bumi beserta fasilitasnya.

Sejatinya, kehidupan di dunia telah mendapat jaminan kemanan dari Allah dengan segala kuasa-Nya. Jika Allah berkenan pun, tidak akan ada sama sekali pertumpahan darah, pertengkarannya dan segala tindakan nirkemanusiaan lainnya. Berdasar ayat tersebut, dapat dipahami bahwa naluri seorang manusia adalah bertengkar, tidak sepaham, dan hal-hal yang menjerumus pada jurang neraka. Sedangkan Allah dengan kehendak-Nya mengingatkan bahkan menolong manusia mencapai persatuan, kehendak menghargai

ketidaksepahaman dan menyelamatkannya hingga cocok untuk menghuni surga-Nya.

Pada ayat ketiga (al-Baqarah [2]: 251), hemat penulis, tidak jauh berbeda dengan ayat sebelumnya. Terdapat peran berupa kuasa dan kehendak-Nya dalam mempertahankan kehidupan manusia agar tetap utuh. Sifat naluriah manusia sebagai makhluk perusak mengharuskan adanya campur tangan-Nya untuk turut dalam mengawal keseimbangan hidup. Seluruh penghuni bumi ini berhak untuk merasakan karunia-Nya. Tidak hanya manusia, hewan dan segala macam tumbuhan di atas bumi memiliki hak utuh dalam bernafas dan hidup dengan tenang.

Oleh karena itu, ayat tersebut oleh Gus Baha' dijadikan sebagai rambu akan pentingnya tindakan demonstrasi oleh masyarakat terhadap jajaran pemerintahan. Pemerintah berkuasa untuk menentukan kebijakan. Namun di sisi lain, rakyat pun memiliki hak untuk ikut serta, memandu, dan mengawal akan lajunya sistem pemerintahan di Indonesia. Demonstrasi tidak selamanya menjadi tindakan amoral yang wajib dibasmi. Sebaliknya, ia justru bias dijadikan oleh pemerintah untuk melakukan evaluasi, koreksi, dan introspeksi diri.

a. Rekontekstualisasi Teks

Apa yang disebut *appropriation* yaitu proses memahami diri sendiri di hadapan dunia yang diproyeksikan teks dan merupakan puncak dari proses penafsiran di mana seseorang menjadi lebih memahami dirinya sendiri. Pada momen ini terjadi dialog antara pembaca dan teks.

Kontekstualisasi yang dimaksudkan adalah bahwa materi teks melepaskan diri dari cakrawala yang terbatas pada pengarangnya, selanjutnya teks tersebut membuka diri terhadap kemungkinan dibaca dan ditafsir oleh pembaca yang berbeda-beda, inilah yang dimaksud dengan rekontekstualisasi.

Berikut proses rekontekstualisasi penafsiran tentang ayat-ayat politik kebangsaan dilihat dari kaca mata hermeneutika Paul Ricoeur. Pertama, tentang singgungan ulul amri dan kaitannya dengan pemerintahan. Syekh Imam Suyuthi melanjutkan bahwa yang dimaksud dengan ulul amri adalah seluruh ulama yang terdiri dari *ahlul halli* (ahli memutuskan perkara) dan *ahlul 'aqdi* (ahli menguraikan masalah). "Masih menurut Imam Suyuthi bahwasanya keputusan pemerintah mestinya masih ditangguhkan atas fatwanya ulama. Hakikat ulama justru ulul amri itu sendiri" (Santri Pancasila, 2020). Ayat ini

mengisyaratkan bahwa bupati, gubernur, bahkan presiden, jika melihat asbabun nuzulnya, tidak termasuk dalam kategori ulul amri.

“Akan tetapi, pengetahuan tentang ini tidak banyak diketahui orang,”(Santri Pancasila, 2020) begitulah Gus Baha’ berdawuh. Dalam teori militer, tidak ada ruang untuk berpolemik, berdu argumentasi dan lain sebagainya yang tentunya mereka dituntut untuk patuh terhadap keputusan final ketuanya. Dalam peperangan, Nabi Muhammad ketika sudah menunjuk satu sahabat untuk menjadi ketua kelimpok perang, maka sahabat lain wajib hukumnya untuk mematuhi segala perintahnya.

Dengan demikian, maka ulul amri dalam ayat tersebut jika dimaknai dengan pemerintah, oleh Gus Baha’ patut kembali dipertanyakan ke khalayak. Harus diperjelas tentang kategorisasi pemerintah yang bagaimana yang harus ditaati dan pada saat bagaimana rakyat wajib menentangnya. Bahkan apabila di lapangan terdapat perbedaan pendapat antara ulama dan pemerintah, maka masih diunggulkan pendapat ulama. Sebagaimana kata Gus Baha’ bahwa ulama lebih berhak memutuskan suatu perkara kepada umatnya.

Indonesia adalah negara demokratis yang menganut beragam agama, bukan termasuk negara yang hanya memiliki satu agama yang wajib dianut. Namun di sisi lain, Islam menjadi agama mayoritas yang pengaruhnya tentu luar biasa dalam melahirkan kebijakan negara dan lain sejenisnya. Oleh sebab itu, hemat penulis, Gus Baha’ dalam memandang redaksi ulul amri dalam Al-Qur'an dan memahaminya sebagai pemimpin perang, bukan pemerintah secara gamblang, dikarenakan mempertimbangkan ajaran Islam. Ditambah lagi, eksistensi pemerintah di tengah masyarakat yang kini mulai hilang juga memberikan pengaruh dalam hal ini. Namun bukan berarti Gus Baha’ memperbolehkan umat Islam atau rakyat Indonesia untuk bebas membangkang pemerintah.

Kedua, demokrasi “*Demokrasi bukanlah syai’un maujuudun (sesuatu yang wujud). Sejatinya demokrasi tidak ada. Lebih orang yang mengataan rela mati demi demokrasi*” . Gus Baha’ bahkan menambahkan bahwa masihlah lebih baik menggantungkan hidup, tidak kepada demokrasi, melainkan pada makanan karena mempertimbangkan sifat kewujudannya (Kajian Cerdas Official, 2020). Demokrasi adalah sebuah teori, ide, dan wacana yang tentunya tidak akan bisa berwujud apa-apa. Tindakan demokratislah yang akan menjadi ejawantah dari apa yang sekadar wacana tersebut.

Gus Baha' memberikan koreksi tegas pada redaksi *rela mati demi demokrasi* ini. Jika hanya mengatasnamakan demokrasi, maka keuntungan timbal-balik tidak akan didapatkan oleh seorang manusia (Kajian Cerdas Official, 2020). Sehingga, menurut beliau, boleh ada tindakan demokratis, namun niatkan untuk menjalankan kesunahan ataupun ajaran agama Islam. Dengan demikian, seorang manusia setelah tindakan demokratis tersebut masih akan diberikan pahala oleh Allah SWT. Gus Selanjutnya, Gus Baha' memberikan indikator terhadap upaya demokrasi ini yaitu terdapat dalam surat Ali 'Imrân [3] 103.

Selanjutnya secara pribadi beliau menyatakan bahwa dalam konteks Indonesia sendiri, yang termasuk tindakan demokratis ialah antara mau memilih NU atau Muhammadiyah. Hadirnya organisasi kemasyarakatan baru *toh* walaupun memiliki visi dan misi yang matang berupa persatuan umat, tetaplah pada akhirnya mereka lah yang akan menjadi propaganda perpecahan umat. Jargon yang diutarakan memang demi mencapai persatuan umat, namun justru kehadiran mereka lah yang menjadi pemicu terbelahnya umat Islam.

Ketiga, demonstrasi. Munculnya pendapat Gus Baha' mengenai demonstrasi ini akibat pertanyaan yang diajukan oleh seorang mahasiswi dari salah satu kampus di Surabaya. Ia menanyakan akan hukum melaksanakan demonstrasi sebagai wujud apresiasi dalam menyuarakan haknya sebagai bangsa Indonesia. Ia sadar bahwa bagi seorang perempuan muslim, terdapat batasan-batasan tindakan yang tidak boleh sembarang dialakukan. Norma-norma Islam memberikan keistimewaan dan pemuliaan terhadap kaum perempuan agar terhindari dari kerugian atau kemaksiatan.

"*Demonstrasi makna pokoknya show. Sebuah pertunjukan. Sementara suatu kekuatan harus ada yang ngontrol,*" begitulah Gus Baha' memulai jawabannya. Untuk itu, fleksibilitas Islam sebagai sebuah agama manusia tidak menghalangi umatnya untuk menyuarakan aspirasinya pada pemerintah atau negara (NU Online, 2019). Sebuah kekuatan harus dikontrol. Demikian halnya dengan laju perkembangan demokrasi di Indonesia yang membutuhkan hadirnya demonstrasi agar ada upaya koreksi dan perbaikan kinerja dari pihak pemerintah. Tindakan demonstrasi oleh Gus Baha' dianggap sebagai salah satu wujud implementasi dari surat al-Baqarah [2]: 251.

Kesimpulan

Praktik politik kebangsaan era kini sudah mulai terkikis dan teralihkan oleh adanya politik kekuasaan. Oleh karenanya, produk penafsiran Gus Baha' akan sedikit mengusik pikiran dan perasaan pemerintah sebagai subjek yang berwenang untuk tidak sembarangan dalam bertindak. Selain itu, masyarakat sebagai objek juga oleh Gus Baha' dihibur dengan asumsi bahwa kesejahteraan mereka tidak ditanggung oleh pemerintah atau presiden manapun, karena Allah melalui kematangan sistem sosial yang akan bertanggung jawab atasnya.

Kontekstualisasi penafsiran Gus Baha' terhadap ayat-ayat politik kebangsaan mengacu pada latar belakang kehidupannya sebagai figur pesantren dan ulama NU. Ayat-ayat politik kebangsaan oleh Gus Baha' dipahami sebagai sarana atau alternatif duniawi untuk memperoleh kebahagiaan ukhrawi nan hakiki. Adanya pemimpin sejatinya tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Melainkan masyarakat bangsalah yang bisa menentukan sendiri apakah mereka akan hidup sejahtera atau tidak. Sedangkan sistem sosial yang mandiri yang bermodalkan sikap simpatik atas sesama masyarakat menjadi kunci utamanya

Daftar Pustaka

- Al-Barry, M. Dahlan Yacub. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Asa, Syu'bah. (2000). Dalam *Cahaya Al-Qur'an*. Jakarta: Gramedia.
- Bisri, Hasan. (2019). Pengembangan Metode Pengajaran Tafsir di Pesantren. *Tajdid*.
- Fadil, Marjan & Najib, Muhammad Ainun. Dimensi Kontekstual
- Hartono & Nurhalim. (2019). Aliansi Politik Kebangsaan Menurut Al-Qur'an Dan Sang Maha Guru. *Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadist*.
- Hidayat, Komaruddin. Kegagalan Peran Sosial Agama....., xxi.
- Irwanto, Edi. Tafsir Ayat-ayat Politik.....
- Istiqlaliyah, Nur. (2019). Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Al-Qur'an (Studi Tematik atas Ayat-ayat Shura dan Kontekstualisasinya di Indonesia). *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Nasurung, Fadlan L. (2017). Islam dan Politik Kebangsaan. *Islami.co*.
- Nawawi, Imam. 2020. Fenomena Gus Baha'; Titik Balik Peradaban Turats Pesantren. *Alif.id*.
- Nisa', Zulia Khoirun. (2019). Kepemimpinan Pemuda Pesantren dalam Politik Kebangsaan (Perspektif Hj. Mundjidah Wahab PP Bahrul Ulum Jombang). *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

- Politik di Indonesia" *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Ash-Shahabah*.
- Rasyid, Muh. Haras. (2020). Aktualisasi Nilai-Nilai Tasamuh dalam Kehidupan Thohir, Muhyidin & Makmun, M.N. Zainal. 2017. Penafsiran Ayat Al-Qur'an Tentang Khilafah. *Sumbula*.
- Rian, Nugroho. 2018. *Kebijakan Membangun Karakter Bangsa di Era Digital, Disruptif dan Kaos*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Wahab, Abdul. (2016). Hermeneutika Pesantren: Eksplorasi atas Pandangan Kyai Pesantren Terhadap Hermeneutika Sebagai *Manhaj Tafsir Nun*.

Website

- ... (2019). Gus Baha' – Hermeneutika, Kematian Teks Agama," *Tabligh Kata Channel*, <https://www.youtube.com/watch?v=9otuSCuerpc&t=266s>
- ... (2014). Kitab Karya Gus Baha' Rembang .Santri Mbeling. <https://sun3mbeling.blogspot.com/2014/12/kitab-karya-gus-baha-rembang.html> diakses pada tanggal 16 Nopember.
- ... (2017). Syarat Menjadi Pemimpin yang harus Dipilih? Gus Baha'. *Sufipedia*. <https://www.youtube.com/watch?v=1966ssAyCqU>
- ... (2017). Syarat Menjadi Pemimpin yang harus Dipilih? Gus Baha'. *Sufipedia*, <https://www.youtube.com/watch?v=1966ssAyCqU>
- ... (2019). Gus Baha' Ditanya Mahasiswi: Hukum Demonstrasi Menurut Islam. *NU Online*. <https://www.youtube.com/watch?v=eq0aCwXV6vU>
- ... (2019). Gus Baha' Ditanya Mahasiswi: Hukum Demonstrasi Menurut Islam," *NU Online*. <https://www.youtube.com/watch?v=eq0aCwXV6vU>
- ... (2019). Gus Baha': Inikah Alasan Kiai-Kiai NU dan Kiai Ma'ruf Berpolitik? *Path to Jannah*. <https://youtube.com/wacth?v=plPcUWyImBU>
- ... (2019). Ngaji Gus Baha' – Tentang Pilpres 2019 – Penting dan Bermanfaat, *Ngaji Kiai*. <https://youtube.com/watch?v=RrJ2gtqOwZ4&t=16s>
- ... (2020). Bagi yang Gila Demokrasi; Dengarkan ini!" *Kajian Cerdas Official*. https://www.youtube.com/watch?v=m0Yj_-UJALs&t=455s
- ... (2020). Bagi yang Gila Demokrasi; Dengarkan ini!" *Kajian Cerdas Official*, https://www.youtube.com/watch?v=m0Yj_-UJALs&t=455s
- ... (2020). Fenomena Gus Baha': Bukti Intelektualisme Tidak Harus Bergelar Akademis. *MusliModerat*. <https://www.muslimmoderat.net/muslimmoderat/2019/10/fenomena-gus-baha-bukti-intelektualisme-tidak-harus-bergelar-akademis>
- ... (2020). Gus Baha Menjelaskan Ulul Amri (Tafsir Munir Murohul Labid PART#1/10). *Santri Pancasila*. <https://www.youtube.com/watch?v=idH9xNQ39q0>

- ... (2020). Gus Baha Menjelaskan Ulul Amri (Tafsir Munir Murohul Labid PART#1/10)", Santri Pancasila,. <https://www.youtube.com/watch?v=idH9xNQ39q0>
- ... (2020). Gus Baha Orang yang belajar ilmu alquran Insyaallah di mudahkan {Al Ithqon } UII D.I Yogyakarta", *Bintang Songo* 1926,. <https://www.youtube.com/watch?v=wcdwQM68W3E>
- ... (2020). Gus Baha: Kenapa 'Ulama' Berkoalisi dengan Pemerintah? *Tholabul Ilmi.* <https://youtube.com/watch?v=DPJ-pktQTk8>
- ... (2020). Gus Baha: Politik Uang, Suap dalam Pemilu, Pilkada dan Pilkades. Terjemah Indonesia. Santreh Konengan. <https://youtube.com/watch?v=IVPB2Nb6FZ8>
- ... (2020). Gus Baha' Pemimpin harus Sabar MEnghadapi Rakyatnya," YT *Ngaji Bareng*, 30 Maret. <https://www.youtube.com/watch?v=PRgKaITaY8A>
- ... (2020). Gus Baha' Pemimpin harus Sabar MEnghadapi Rakyatnya," YT *Ngaji Bareng*. <https://www.youtube.com/watch?v=PRgKaITaY8A>
- ... (2020). Memilih Pemimpin Wanita yang Adil vs Pemimpin Lelaki yang Zalim – Gus Baha'.m Kajian Islam. <https://www.youtube.com/watch?v=rj5iFUD5tKc>
- ... (2020). Memilih Pemimpin Wanita yang Adil vs Pemimpin Lelaki yang Zalim – Gus Baha'," Kajian Islam. <https://www.youtube.com/watch?v=rj5iFUD5tKc>
- ... (2020). Pemerintah Indonesia Gagal? Gus Baha Meluruskan Pemikiran Kita Semua. *Agus Mujib.* <https://yotube.com/watch?v=6hUTk3sLn8U>
- Ahmad, Kholilul Rohman. (2019). Kanal Gus Baha' ditinjau dari Pita Kaset Zainuddin MZ. *Alif.id.* <https://alif.id/read/kholilul-rohman-ahmad/kanal-gus-baha-ditinjau-dari-pita-kaset-zainuddin-mz-b224486p/>
- Aminullah. (2011). Politik Kebangsaan (Perspektif Historis). *Blog Pribadi*, edisi Jumat, 11 Februari
- Anam, A. Khoirul. (2019). Fenomena Gus Baha'. *Laduni.* <https://www.laduni.id/post/read/66908/fenomena-gus-baha>
- Budi. (2020). Biografi Gus Baha (KH. Bahauddin Nursalim). *Laduni*, 17 Januari. <https://www.laduni.id/post/read/66908/biografi-gus-baha-kh-ahmad-bahauddin-nursalim>
- Fadlan L. Nasurung. (2017). Islam dan Politik Kebangsaan. *Redaksi Indonesia*. edisi 6 April.
- Fathurrosyid. (2019). Ngaji Gus Baha: Terapi Spiritual di Tengah Gencarnya Islam Bernada Sedih. *Alif.id.* <https://alif.id/read/fathurrosyid-tetala/ngaji>

[gus-baha-terapi-spiritual-di-tengah-gencarnya-islam-bernada-sedih-b224991p/](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=Ls9Wmh7wuzQ> diakses pada tanggal 22 April 2020.

Video Pengajian Gus Baha' || Pentingnya Mengetahui Perbedaan Antar Imam Mazhab.